

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023

SEKRETARIAT DAERAH



KABUPATEN BANGKALAN

TA. 2019

Form					
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan					
No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				
7	Perumusan isu - isu strategis	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10	Perumusan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	√			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
17	Perumusan indikator kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/kota	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan				

Bangkalan, April 2019
**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
 SETDA KABUPATEN BANGKALAN**

JUPRIYANTO,S.Sos,MM
Pembina
NIP. 197004131998031005



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN SOEKARNO – HATTA NO. 35 TELP. (031) 3098572

BANGKALAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

188.4/ /Kpts/433.022/2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN

TAHUN 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN ,

Menimbang :

- a. Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, maka perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan

rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Baerah Tahun 2013 Nomor 4/D).
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 08 Tahun 2019 Ttg RENSTRA PD TAHUN 2018-2023Di Lingkungan Pemkab Bangkalan Tanggal 22 April 2019
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2/A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 Nomor 1 Tahun 2019, dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada Tanggal

**Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

Drs.SETIJABUDHI .NK.MM

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TH. 2018-2023
KABUPATEN BANGKALAN TA. 2019

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	N A M A	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah	Ketua	Ir. Puguh Santoso ,M.MA	Asisten Adm. Perekonomian dan Pembangunan
2.	Bagian Administrasi Pembangunan	Wakil Ketua	Muh Zainul Qomar,S.Ag.M.Si	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
3.	Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretaris	Rafica Oktaviana.SE.MM	Kasubbag. Penyusunan Program
4	Bagian Administrasi Pembangunan	Notulis	Fina Ulya Frhatin.S.Pd	Staf bagian adm. Pembangunan
5.	Bagian Administrasi Kesra	Anggota	Nur Annisa	Kasubbag kesejahteraan sosial
6.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	Indra Bagus Kusuma .SH	Kasubbag pelayanan
7.	Bagian Humas dan Protokol	Anggota	Emalia Kusuma Dewi	Kasubag Humas
8.	Bagian Umum	Anggota	Bachtiar M.Sulthony, SE	Kasubag bagian umum
9.	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Anggota	Lukman Hakim	Staf bagian keuangan dan perlengkapan
10.	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otod	Anggota	Novi Rosalinda ,S.IP	Staf bagian adm. Pemerintahan dan otoda
11.	Bagian Perekonomian	Anggota	Nova Indriani.SE	Staf bag. Perekonomian
12.	Bagian Hukum	Anggota	Budi Sulistiyono.SH	Staf bagian hukum
13.	Bagian Organisasi	Anggota	Dewi Anggaraini Soe'oed.SE	Staf bag. Organisasi dan aparatur
14.	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	Moh Ismail Djakfar.SE	Staf bagian adm. Pembangunan
15.	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	Fachroni Hariyadi	Staf bagian adm. Pembangunan
16.	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	Sukron Makmun	Staf bagian adm. Pembangunan

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	N A M A	KETERANGAN
17.	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	Indriani Herawaty, SE	Staf bagian adm. Pembangunan
18.	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	Sudarmanto	Staf bagian adm. Pembangunan
19.	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	Slamet Suryadi .SE	Staf bagian adm. Pembangunan
20.	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	Madya Satrya	Staf bagian adm. Pembangunan

Bangkalan, 2019

**Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

Drs. SETIJABUDHI NK.MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196003011985021004

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018- 2023 dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018- 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara garis besar, sederhana dan ringkas mengenai visi, misi, tujuan sasaran dan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dalam membantu Bupati Bangkalan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, administrasi dan organisasi serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 ini, dapat dijadikan sebagai pedoman rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sesuai tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.

Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memeberikan bimbingan serta petunjuknya, sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian masing-masing demi kemajuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan khususnya dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

**Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

Drs.SETIJABUDHI NK.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196003011985021004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	5
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
	1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH.....	11
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.....	11
	2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah.....	14
	2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	18
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	20
BAB III	PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH...	23
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	23
	3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	24
	3.3 Telaahan Renstra K/L	25
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	26
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	27
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH	30
	4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	30
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH.....	33
	5.1 Tujuan, Strategi dan arah kebijakan	33
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	36
	6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah.	36.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	41
	7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah	41
BAB VIII	PENUTUP.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dengan lingkungan yang selalu berubah mendorong timbulnya reformasi di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan salah satunya adalah perkembangan system pemerintahan sejalan dengan paradigma yang berkembang di masyarakat, yang mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), *Good governance* yang bercirikan antara lain demokratis, desentralistik, transparan serta pemberdayaan masyarakat, mewajibkan adanya system akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat, baik di Pusat maupun di Daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan Untuk mewujudkan akuntabilitas dimaksud, diperlukan adanya rencana strategis sebagai alat untuk mengukur kinerja dalam kurun waktu tertentu .

Bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan kebijakan pemerintah diberbagai bidang antara lain yang mengatur desentralisasi dan otonomi daerah yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi ketatanegaraan yang semakin dinamis.

Ditetapkannya kebijakan-kebijakan pemerintah diatas melahirkan adanya perubahan, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga lembaga pemerintahan di Pusat dan Daerah. Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang berdampak pada perubahan beban dan karakteristik tugas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa dalam penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, secara khusus perlu menyikapi dalam kedudukan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, penataan dan peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah, sarana dan prasarana serta perangkat-perangkat pelayanan umum secara terarah, terpadu dan terkoordinasi.

Otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara

efektif dan ekonomis, lebih mendekatkan pemerintah sebagai penyedia layanan (*services provider*) kepada masyarakat sebagai penerima layanan (*services recipient*), maka sudah saatnya mengambil langkah-langkah perbaikan pelayanan umum terhadap masyarakat melalui peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah secara profesional dan deregulasi kebijakan-kebijakan di bidang pelayanan umum. Sejalan dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh masyarakat.

Dengan meningkatnya kualitas pelayanan umum di Daerah, maka citra/wibawa Aparatur Pemerintah Daerah di mata masyarakat akan meningkat. Disamping aspek tersebut diatas, di era globalisasi ini, tingkat persaingan semakin tajam diberbagai sektor ekonomi, penyediaan barang dan jasa. Kondisi demikian menuntut ditingkatkannya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam menghadapi era globalisasi tersebut diatas, salah satu komponen Pemerintah Daerah yang perlu segera dibenahi adalah karakter, budaya dan kondisi disiplin Aparatur Pemerintah. Artinya semakin baik pelayanan yang dapat dilakukan oleh Aparatur Pemerintah, maka semakin baik citra Aparatur Pemerintah itu sendiri.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan.

Untuk itu, segenap penyelenggara negara perlu mengembangkan sikap dan perilaku baru yang lebih bersih, transparan, profesional dan bertanggungjawab terhadap setiap tindakan yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya di lembaga atau instansi masing-masing. Penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban pejabat publik atau lebih dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan dapat merubah "citra" para penyelenggara negara (Birokrasi Pemerintahan dan Legislatif) baik di Pusat maupun Daerah, agar lebih bertanggungjawab terhadap keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai unit Esselon IIa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, yang disusun mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dengan Visi "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL**" serta dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dapat berpengaruh

terhadap kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan. Maka dengan ini untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan mempunyai MISI II yaitu **” Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi “**

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai unit kerja Esselon II, telah menetapkan arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan masa mendatang dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum demi tercapainya Akuntabilitas Kinerja seluruh Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan yang terkait dengan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,tata cara Penyusunan,pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1);
 13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 4/D).
 14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) PD Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tanggal 22 April 2019.

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2/A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah kabupaten Bangkalan dari Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan, sekaligus sebagai parameter evaluasi kegiatan selama kurun waktu 5 tahun kedepan, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan umum yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Menjabarkan pernyataan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun;
2. Menentukan arah kebijakan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam rangka optimalisasi otonomi daerah;
3. Menentukan arah kegiatan selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun;
4. Untuk mempermudah pencapaian organisasi;
5. Sebagai dasar terlaksananya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan disusun secara sistematika yang terbagi dalam tiap – tiap bab dan masing – masing bab terdiri dari sub bab yang secara lengkap sistematika penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Setda

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

❖ Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

❖ Fungsi

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, sebagai

pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan dan OTODA, membawahi :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah;
 - c) Subbagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Subbagian Pendidikan dan Kepemudaan;
 - b) Subbagian Keagamaan dan Kebudayaan;
 - c) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 3. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Pengkajian Hukum;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
 - a) Subbagian Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
 - b) Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Produk Daerah;
 - c) Subbagian Penanaman Modal dan BUMD;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian;
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Usaha Pengadaan;
 - b) Subbagian Pelayanan;
 - c) Subbagian Sanggahan dan Banding;
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Kepegawaian;
 - c) Subbagian Operasional;
 2. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
 - c) Subbagian Pengembangan Kinerja;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
 - a) Subbagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Subbagian Dokumentasi;
 - c) Subbagian Protokol;
 4. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, membawahi :
 - a) Subbagian Keuangan;
 - b) Subbagian Perlengkapan dan Aset;
 - c) Subbagian Rumah Tangga .
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Staf Ahli

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagaimana disajikan dalam bagan 2.1. berikut:

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Komposisi pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan secara kuantitas maupun kualitas masih perlu untuk ditingkatkan, oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari kecukupan pegawai dan kemampuan serta wawasan yang dimiliki. Dilingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 311 orang dan, tenaga harian lepas (THL) sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) orang .

Jumlah pegawai dilingkungan Sekretariat Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kegiatan kantor dengan rincian sebagai berikut :'

Tabel 2.2.1
Daftar Komposisi Pegawai Menurut Jabatan, Diklat Penjurangan, Diklat Teknis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

No.	JABATAN	JUMLAH
1.	Sekretaris Daerah	1
2.	Asisten	3
3.	Staf Ahli	3
4.	Kepala Bagian	10
5.	Kepala Sub Bagian	30
	Jumlah	47

Tabel 2.2.2
Daftar Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan, Jabatan/Golongan,
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

No.	JENIS DATA	PNS	JUMLAH
Pendidikan			
1.	Pasca Sarjana	22	22
2.	Sarjana	105	105
3.	D3	4	4
4.	SMA	55	55
5.	SMP	7	7
Komposisi PNS Menurut Pangkat/Golongan			
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	1
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	6	6
3.	Pembina Tk.I (IV/b)	6	6
4.	Pembina (IV/a)	8	8
5.	Penata Tk.I (III/d)	19	19
6.	Penata (III/c)	45	45
7.	Penata Muda Tk.I (III/b)	28	28
8.	Penata Muda (III/a)	26	26
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	12	12
10.	Pengatur (II/c)	16	16
11.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	7	7
12.	Pengatur Muda (II/a)	13	13
13.	Juru Tk.I		
14.	Juru	4	4
15.	Juru Muda Tk.I	2	2
16.	Juru Muda		

Tabel 2.2.3
Daftar Pendidikan Kedinasan Struktural

Spama/Diklatpim III	10 Orang
Adum/Diklatpim IV	25 Orang

Tabel 2.2.4
Daftar Eselon / Jabatan

Eselon II	7 orang
Eselon III	10 orang
Eselon IV	30 orang

Untuk jabatan struktural sebanyak 47 jabatan terdiri dari 8 orang eselon IIb, 10 orang eselon III.a dan 30 orang eselon IV.a. Selain itu telah banyak pula yang mengikuti diklat penjenjangan dan diklat teknis. Untuk lebih rinci dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.5
Daftar Perlengkapan

NO	NAMA BARANG	J U M L A H
1	Gedung kantor	25
2	Alat-alat angkutan darat bermotor sedan	2
3	Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	23
4	Alat-alat angkutan darat bermotor bus	1
5	Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	2
6	Alat-alat angkutan darat bermotor truck	1
7	Alat-alat angkutan darat bermotor pick up	1
8	Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	337
9	Mesin ketik	25
10	Mesin hitung	16
11	Mesin fotocopy	4
12	Mesin penghancur kertas	17
13	Tabung pemadam kebakaran	15
14	Peralatan kantor lainnya	34
15	Papan data / reklame dan peta	15
16	Almari	32
17	Brankas	46
18	Filling kabinet	56
19	Rak	18
20	Peralatan industri rumah tangga	57
21	Pigura/gambar presiden dan wapres/lambang garuda	57
22	Papan nama/papan tulis	55
23	Vacum cleaner	13

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
24	Air conditioner	211
25	Kipas angin	44
26	Televisi	43
27	Genset	5
28	Peralatan rumah tangga	1048
29	Mesin potong rumput	6
30	Komputer/PC	146
31	Komputer notebook	124
32	Printer	153
33	Scanner	8
34	Monitor/display	12
35	UPS/stabilizer	52
36	Peralatan jaringan komputer	30
37	Meja kerja	346
38	Meja rapat	44
39	Meja makan	59
40	Kursi kerja	1070
41	Kursi rapat	1889
42	Sofa / kursi tamu	75
43	Tabung gas	11
44	Kompor gas	17
45	Dispenser	35
46	Kulkas	18
47	Kamera	22
48	Handycam	2
49	LCD	31
50	Alat-alat studio lainnya	49
51	Telepon	1
52	Faximili	28
53	Radio HF/FM (handly talkie)	44
54	Alat-alat komunikasi lainnya	10

NO	NAMA BARANG	J U M L A H
55	Karpet	10
56	Kompresor	1
57	Server	5

Ungkapan atas dasar Data Aset dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah, pilih Jenis Aset yang dominan penting.

2.3. Kinerja Pelayanan

Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi harus dapat memberikan layanan yang baik kepada pimpinan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima.

Aspek pengelolaan pemerintahan umum selama kurun waktu th 2018-2023 berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun dengan pencapaian hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan disajikan dalam tabel 2.1 dan untuk anggaran realisasi pendanaan pelayanan disajikan dalam tabel 2.2 berikut:

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada Tabel 2.1 Indikator Kinerja Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja secara tepat waktu dan sesuai ketentuan pada Tahun 2017 capaian kinerjanya 52,90%, hal ini disebabkan karena keterlambatan OPD mengumpulkan LAKIP dan ketidaksesuaian penyusunan LAKIP Perangkat Daerah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kelulusan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai minimal 420 tidak terlaksana karena tidak adanya dukungan anggaran. Sedangkan untuk indikator lainnya pencapaian kinerja adalah 100% atau sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 pasal 133 tentang Tata Perencanaan Daerah (PD), Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD), Kegiatan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah yang menjelaskan bahwa rancangan renja perangkat daerah yang telah dilaksanakan pembahasan dan penyempurnaan dalam forum peramgkat daerah /lintas sektor perangkat daerah, maka disampaikan berberapa hal terkait rencana penyesuaian program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sebagai berikut :

- a. Penyesuaian program dan kegiatan dalam rangka penyusunan renstra dan RKPD baru
- b. Perampingan kegiatan karena adanya banyak kegiatan dan indikator yang sama
- c. Rencana Pembangunan yang idial maksimum 1 kegiatan pada pejabat struktural sebagai pelaksana teknis .
- d Untuk indikator sebelumnya Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah sedangkan untuk lima tahun kedepan maka ada tambahan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah.

Upaya Reformasi Birokrasi hingga kini masih saja belum mencapai titik akhir, masih banyak yang perlu diatur, dilaksanakan dan dikendalikan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan disetiap level pemerintahan mulai pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Sebagai pembuat regulasi di level Kabupaten fungsi Sekretariat Daerah sangat vital dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawalan setiap pembentukan regulasi dan implementasi, melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan akan berbagai regulasi yang dapat membantu berjalannya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, kedalam berbagai macam kebijakan secara legal formal dalam bentuk peraturan hukum daerah (Peraturan Daerah) dan kebijakan Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Adapun beberapa kebijakan nasional yang perlu ditindak lanjuti melalui regulasi daerah, seperti kebijakan Reformasi Birokrasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penataan organisasi.

Selain berfungsi menjalankan fungsi penataan regulasi Sekretariat Daerah juga memiliki peran yang besar dalam rangka fasilitasi, koordinasi dan pemantauan lintas Perangkat Daerah atas semua pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang berlokus dan berdampak di wilayah kabupaten. Peran sentra yang dijalankan Sekretariat Daerah dalam hal ini secara institusional, dituntut memiliki komabilitas kemampuan untuk menyerap, memahami dan mengkomunikasi berbagai kebijakan diatas untuk diterapkan didaerah.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah memiliki peluang sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berbasis IT;
2. Jumlah Sumber Daya Aparatur yang memadai;
3. Terlaksananya koordinasi yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan;
4. Penyediaan regulasi dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan secara komprehensif;
5. Pembangunan gedung kantor yang representative;

Dengan demikian disamping peluang dalam proses pencapaian kinerja Sekretariat Daerah, tentunya ke depan dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah, diantaranya menyangkut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, terutama dari segi kualitas dan disiplin yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan;
2. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan baik secara intern dinas maupun ekstern lintas sektoral;
3. Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan pencapaian yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan perencanaan selanjutnya;
4. Kurang optimalnya akses informasi hukum bagi masyarakat;
5. Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Perwujudan *good governance* merupakan tuntutan dan harapan yang mesti dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah. Implementasi pencapaian *good governance* tersebut diperlukan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dikeluarkannya berbagai regulasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan aspiratif serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat menuntut setiap instansi memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi serta komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan berbagai peraturan yang dikeluarkan.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, masih dijumpai beberapa hambatan berupa :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, terutama dari segi kualitas dan disiplin yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan;
2. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan baik secara intern dinas maupun ekstern lintas sektoral;

3. Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan pencapaian yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan perencanaan selanjutnya;
4. Kurang optimalnya akses informasi hukum bagi masyarakat;
5. Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Adapun visi dari Kabupaten Bangkalan adalah:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah dikemukakan diatas, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi;
3. Menyelenggarakan Pelayanan Dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah;
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat;

5. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Berdasarkan misi Kabupaten Bangkalan tersebut di atas, Sekretariat Daerah mengemban tugas pada misi Ke-1 (satu) yaitu Mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas dan misi ke-2 (dua), yaitu Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi. Untuk pencapaian misi yang pertama Sekretariat Daerah sebagai unsur pendukung terkait dengan Indikator Indeks Kesalehan Sosial.

Adapun tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan.

Sasaran yang akan dituju oleh Sekretariat Daerah dalam melaksanakan misi tersebut, yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah daerah
2. Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah
3. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam menyusun rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, tetap berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen dimaksud maka langkah-langkah untuk melakukan analisis juga menggunakan langkah-langkah dengan metode yang sama. Secara umum kebijakan, rencana dan program (KRP) yang terintegrasikan

dalam matriks rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan penandanaan indikatif Tahun 2018 – 2023 tidak terdapat indikasi yang menyebabkan peluang kerusakan lingkungan skala makro maupun mikro. Karena kebijakan, rencana dan program (KRP) Perangkat Daerah yang direncanakan akan diselenggarakan Tahun 2018 - 2023. Pada Sekretariat Daerah hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi rutin untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintahan umum dan pelayanan lainnya ke masyarakat secara langsung.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Sekretariat bukan dinas yang bersentuhan langsung dengan RTRW tahun 2009-2029. Namun dalam pembuatan kebijakan harus memperhatikan kebijakan yang tertuang pada RTRW tahun 2009-2029, salah satunya kebijakan penetapan kawasan strategis. Kebijakan penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangkalan dilakukan pada kawasan yang memiliki Pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah sekitarnya, kegiatan lain yang sejenis maupun tidak sejenis, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat strategi penataan dan kawasan strategi dilingkungan dengan :

1. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
2. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;

3. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya;
4. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;
5. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sesuai pengintegrasian KLHS ke dalam RPJMD, ada beberapa Perangkat Daerah yang bersentuhan langsung pada KLHS. Tetapi Sekretariat Daerah tidak langsung mengakomodir kebijakan yang ada pada KLHS. Kebutuhan Sekretariat Daerah terhadap KLHS hanya pada memperhatikan KLHS pada lingkup kegiatan pelaksanaan, untuk program tidak ada yang langsung terkait KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

❖ Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara rinci isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, terutama dari segi kualitas dan disiplin yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan;
2. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan baik secara intern dinas maupun ekstern lintas sektoral;

3. Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan pencapaian yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan perencanaan selanjutnya;
4. Kurang optimalnya akses informasi hukum bagi masyarakat;
5. Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan

❖ **Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan ditetapkannya perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), maka kondisi yang diinginkan agar fungsi perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Sekretariat dan Perangkat Daerah lainnya;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

SEKRETARIAT DAERAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Tujuan :

Rencana Strategis mengacu visi dan misi kepala daerah yang terpilih, untuk menyelaraskan maka perlu menerjemahkan sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan kepala daerah. Maka sesuai dengan Tupoksi Sekretariat Daerah berikut Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diakomodir oleh Sekretariat Daerah:

***“Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten
Bangkalan”***

Penyelenggaraan pelayanan pemerintah Kabupaten Bangkalan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berfungsi memfasilitasi perumusan kebijakan. Sekretariat Daerah memberikan pelayanan harus menetapkan suatu tujuan sebagai arahan Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang. Penentuan Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Tujuan adalah tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Sekretariat Daerah selama lima tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah wajib mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Bangkalan yang dijabarkan pada sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan. Tujuan Sekretariat Daerah harus mengacu dengan sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat daerah. Berikut tujuan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan:

❖ Tujuan

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah kabupaten bangkalan

Setelah menetapkan tujuan maka ditetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Sekretariat Daerah menjabarkannya dalam suatu sasaran:

❖ Sasaran

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah daerah;
Dengan program prioritas :
 - a. Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Program Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta pengembangan kinerja

2. Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah;

Dengan program pendukung :

- a. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan;
 - b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Pengkajian Hukum;
 - c. Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah;
 - d. Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan;
 - e. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan kehumasan;
 - g. Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan;
 - h. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
3. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan

Dengan program pendukung :

- a. Program Pelayanan Kesekretariatan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Jangka Menengah Sekretariat Daerah

dijelaskan dalam tabel 4.1 berikut:

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH

5.1. Tujuan ,Sasaran ,Strategi dan Kebijakan

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Adapun arah kebijakan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah adalah :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah, dengan strategi :
 - a. Optimalisasi fasilitasi peningkatan kualitas administrasi Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; dan arah kebijakan :
 - Memfasilitasi perangkat daerah dalam pengumpulan dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah

- b. Mengoptimalkan penataan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pengembangan kinerja perangkat daerah, dan arah kebijakan :
 - Menyelenggarakan akuntabilitas dan pengembangan kinerja, penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah, serta penataan kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan;
2. Sasaran 2 : Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah, dengan strategi :
 - a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui monitoring, evaluasi, transparansi perencanaan dan penggaran serta pelaksanaan APBD, dan arah kebijakan :
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian melalui monitoring, evaluasi, transparansi perencanaan dan penggaran serta pelaksanaan APBD;
 - b. Meningkatkan tugas koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan keagamaan dan kesejahteraan sosial; dan arah kebijakan :
 - Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan keagamaan, budaya, kependidikan, kepemudaan dan kesejahteraan sosial
 - c. Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga; dan arah kebijakan :
 - Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

- d. Meningkatkan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah; dan arah kebijakan :
- Melaksanakan pelayanan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah;
 - Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai.
- e. Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa; dan arah kebijakan :
- Memfasilitasi pelayanan pengadaan barang dan jasa;
- f. Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah; dengan arah kebijakan :
- Melaksanakan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah;
- g. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum; dengan arah kebijakan :
- Melaksanakan penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum.
3. Sasaran 3 : Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan, dengan strategi :
- a. Meningkatkan Sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja perangkat daerah; dan arah kebijakan :
- Memberikan pelayanan yg optimal di internal perangkat daerah.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah dijelaskan dalam tabel V berikut :

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka perlu ditunjang dengan program dan kegiatan yang saling sinergis untuk mendukung pencapaian keberhasilan. Adapun program dan kegiatan selama kurun waktu 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dan Pendanaan Sekretaria Daerah

1. Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - a. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Umum (Bagian Administrasi Pemerintahan dan OTODA)
 - b. Fasilitasi Desa Kecamatan dan Kelurahan (Bag. Administrasi Pemerintahan dan OTODA)
 - c. Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Bag. Administrasi Pemerintahan dan OTODA).
2. Program Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta Pengembangan Kinerja;
 - a. Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja (Bag. Organisasi)
 - b. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Analisis Jabatan (Bag. Organisasi)
 - c. Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Bag. Organisasi)

3. Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan;
 - a. Pengendalian Pembangunan daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
 - b. Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
4. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan;
 - a. Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan Sosial (Bagian Kesra)
 - b. Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Agama dan Kebudayaan (Bagian Kesra)
 - c. Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Pendidikan dan Kepemudaan (Bagian Kesra)
5. Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan;
 - a. Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Keuangan dan Perlengkapan (Bagian Keuangan dan Perlengkapan)
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan (Bagian Keuangan dan Perlengkapan)
6. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ;
 - a. Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai (Bag. Administrasi Perekonomian)

7. Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah;
 - a. Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Bagian Perekonomian)
 - b. Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Produk Daerah (Bagian Perekonomian)
 - c. Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan BUMD (Bagian Perekonomian)
8. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - a. Penatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
 - b. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
 - c. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui Bagian PBJ (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
9. Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan kehumasan;
 - a. Koordinasi Kehumasan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (Bagian Humas dan Protokol)
 - b. Penyebarluasan informasi KDH/WKDH, Sekretaris Daerah (Bagian Humas dan Protokol)
 - c. Koordinasi Keprotokolan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (Bagian Humas dan Protokol)

10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Pengkajian Hukum;
 - a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Bagian Hukum)
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum (Bagian Hukum)
 - c. Dokumentasi dan Pengkajian Hukum (Bagian Hukum)
11. Program Pelayanan Kesekretariatan;
 - a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (Bag. Umum)
 - b. Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah
 - c. Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah (Bagian Keuangan dan Perlengkapan)
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bagian Keuangan dan Perlengkapan)
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bagian Keuangan dan Perlengkapan)
 - f. Peningkatan Disiplin Pegawai (Bagian Umum)
 - g. Peningkatan Kapasitas Aparatur (Bag. Umum)
 - h. Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
 - i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
 - j. Penyusunan Laporan Keuangan (Bagian Keuangan dan Perlengkapan)
 - k. Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional (Bagian Adpum)



**BUAT TABEL PROGRAM DAN
KEGIATAN**

CONTOH:

Program AAAAAAAAAA

Kegiatan XXX

Kegiatan YYY

Kegiatan ZZZ

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Rencana, Program, dan Kegiatan serta Pendanaan pada Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel VI.I berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja Sekretariat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah pada lima tahun kedepan. Hal ini ditujukan akumulasi pencapaian indikator outcome program kegiatan setiap tahun atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun dapat dicapai. Suatu indikator kinerja Sekretariat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaiannya. Penetapan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah kabupaten Bangkalan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai berikut:

1. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) status LPPD di tahun 2018 sudah mencapai status Sangat Tinggi, diharapkan lima tahun ke depan lebih meningkat peringkatnya;
2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah, dengan dasar lima tahun terakhir dengan nilai CC selama 4 tahun dan di tahun 2018 meningkat menjadi B dengan skor 60,10 diharapkan lima tahun ke depan mendapatkan skor yang lebih tinggi lagi dan;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan diharapkan lima tahun ke depan meningkat nilainya dan lebih berorientasi kepada perbaikan Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

4. Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah tepat waktu sesuai ketentuan;
5. Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, dengan indikator ini diharapkan agar Perangkat Daerah lebih maksimal lagi dalam penyusunan LAKIP agar dapat menjadi dokumen yang benar-benar melaporkan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan tepat waktu penyampaiannya;
6. Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik, diharapkan agar Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai Kepuasan Masyarakat berkategori Baik menjadi lebih banyak lagi;
7. Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan diharapkan untuk lima tahun ke depan meningkat karena optimalisasi penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan dan keagamaan;
8. Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, untuk lima tahun ke depan meningkat karena diharapkan legitimasi penyusunan kebijakan bidang hukum diterima dan dirasakan oleh masyarakat;
9. Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindak lanjuti diharapkan untuk lima tahun kedepan meningkat karena optimalisasi penyusunan kebijakan bidang perekonomian;
10. Persentase Kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran terhadap Belanja Langsung dan memonitoring Kegiatan Fisik Konstruksi ;
11. Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ meningkat;

12. Indeks Kepuasan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah meningkat;
13. Persentase Perlengkapan, keuangan dan Rumah Tangga yang terfasilitasi dengan baik;
14. Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan meningkat.
15. Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai yang sesuai dengan perundang-undangan di Bidang Cukai

BAB VIII PENUTUP

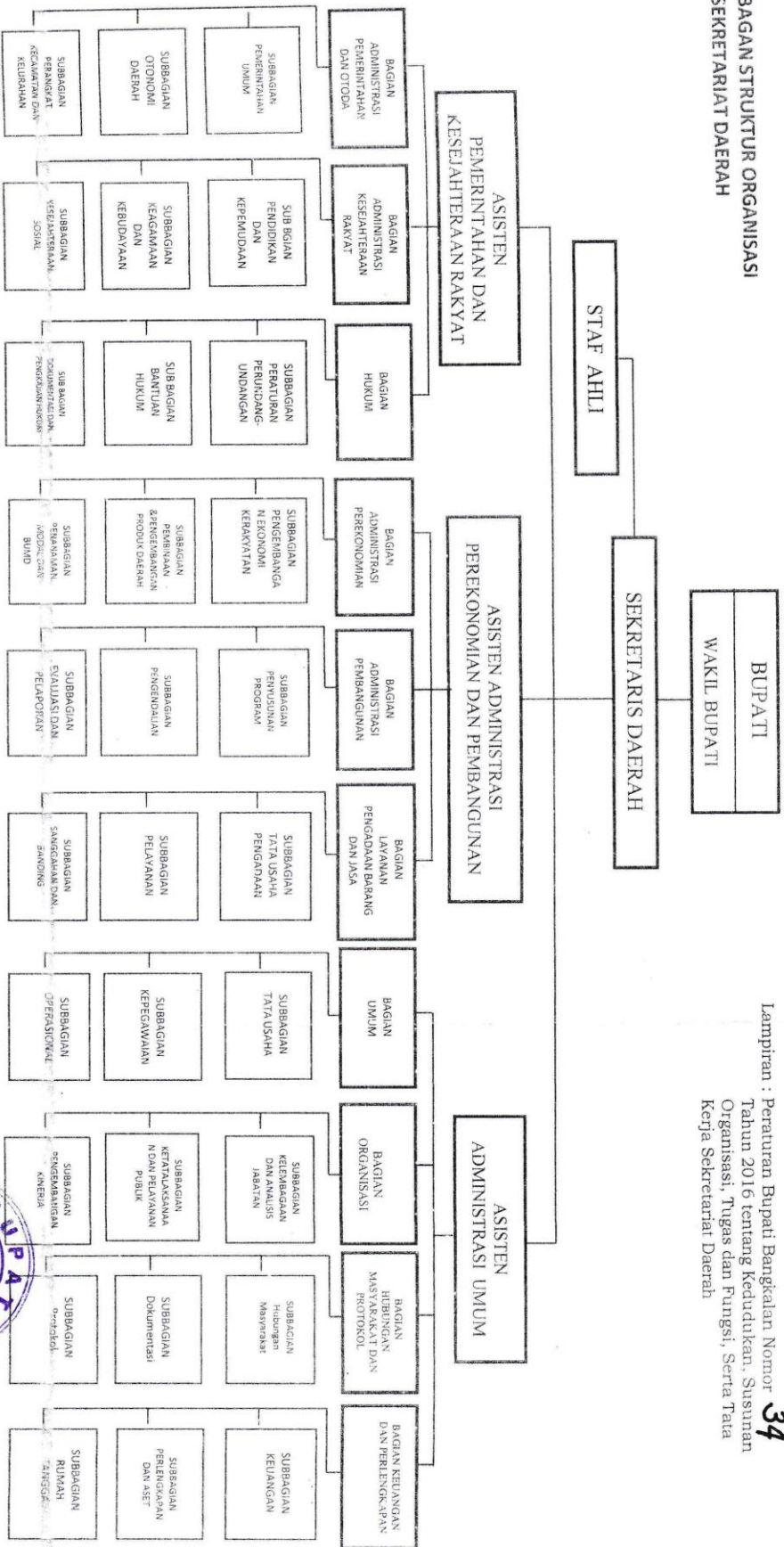
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, Pembangunan Jangka Menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Oleh karenanya seluruh program pembangunan jangka menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah di lingkungan sekretariat daerah kabupaten bangkalan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasikinerja yang akan dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabupaten Bangkalan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. Semoga dengan tersusunnya Perubahan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 ini, dapat memberi banyak manfaat didalam meningkatkan kinerja Akhirnya, kami berharap adanya masukan dan kritik yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja dimasa yang akan datang kearah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**



Lampiran : Peraturan Bupati Bangkalan Nomor **34**
 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
 Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
 Kerja Sekretariat Daerah

BUPATI BANGKALAN
 MUHAMMAD SAMAKUNIBNU FUAD

	Kegiatan Pengadaan sarana & Prasarana Aparatur	29,956,000	30,000,000	31,170,700	33,992,300	0	29,956,000	30,000,000	22,691,500	33,992,300	0	100.00	100.00	72.80	100.00	#DIV/0!	-21.7	-18.6
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	621,200	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,740,000	621,200	2,500,000	100.00	100.00	69.60	100.00	100.00	0.0	#DIV/0!
	Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Keuangan Daerah	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,229,200	2,500,000	2,500,000	2,351,000	2,100,000	1,229,200	2,500,000	100.00	94.04	84.00	100.00	100.00	13.1	11.3
3	Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja																	
	Kegiatan Penunjang Operasional SKPD	307,200,300	320,850,300	293,053,300	298,398,400	331,199,000	293,709,824	299,221,234	236,227,245	279,661,897	333,699,000	95.61	93.26	80.61	93.72	100.75	4.4	#DIV/0!
	Kegiatan Monitoring & Evaluasi Pelaksana Belanja,	53,000,000	55,000,000	25,000,000	0	0	53,000,000	54,998,800	22,120,000	0	0	100.00	100.00	88.48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Bantuan Sosial dan Keuangan																	
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	957,500	2,500,000	2,500,000	#DIV/0!	100.00	38.30	100.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.																	
	Kegiatan Peringatan Hari Besar Negara	200,000,000	200,000,000	145,000,000	238,642,500	276,000,000	198,775,000	197,725,000	143,975,000	238,642,500	276,000,000	99.39	98.86	99.29	100.00	100.00	0.0	#DIV/0!
5	Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.																	
	Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Pelayanan	25,000,000	50,000,000	35,000,000	0	0	25,000,000	50,000,000	34,782,000	0	0	100.00	100.00	99.38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Sosial kepada Masyarakat.																	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pelayanan Sosial Kpd Masyarakat.	18,500,000	20,350,000	20,000,000	0	18,000,000	18,220,000	19,650,000	17,165,000	0	18,000,000	98.49	96.56	85.83	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Kegiatan Pelatihan Pengelola TPA	16,544,000	18,000,000	19,000,000	4,277,200	0	16,044,000	18,000,000	16,900,000	4,277,200	0	96.98	100.00	88.95	100.00	#DIV/0!	8.8	#DIV/0!
	Kegiatan Pelatihan Pengelola PAUD	17,500,000	19,250,000	18,000,000	0	18,000,000	17,485,000	19,250,000	15,600,000	0	18,000,000	99.91	100.00	86.67	#DIV/0!	100.00	10.0	#DIV/0!
	Kegiatan Sosialisasi HIV / AIDS	18,500,000	20,000,000	18,000,000	17,400,000	0	18,400,000	19,830,000	15,574,000	17,400,000	0	99.46	99.15	86.52	100.00	#DIV/0!	-26.3	-25.5
6	Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Sosial.																	
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Sosial	19,000,000	20,900,000	19,000,000	18,700,000	18,000,000	18,850,000	20,788,000	16,624,000	18,700,000	18,000,000	99.21	99.46	87.49	100.00	100.00	-1.1	-0.3
7	Program Pengembangan Wawasan Keagamaan																	
	Kegiatan Fasilitas dan Penyelenggaraan MTQ	200,000,000	150,000,000	125,000,000	113,975,000	246,850,000	193,250,000	135,240,000	125,000,000	113,225,000	216,850,000	96.63	90.16	100.00	99.34	87.85	-25.0	#DIV/0!

	Kegiatan Pembinaan Pelestarian Budaya Islami	16,500,000	18,000,000	18,000,000	0	0	16,500,000	18,000,000	15,500,000	0	0	100.00	100.00	86.11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Kegiatan Pemberdayaan Pengelola ponpes & Madrasah	17,000,000	18,700,000	19,000,000	0	0	17,000,000	18,700,000	15,128,000	0	0	100.00	100.00	79.62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Kegiatan Bulan Ramadhan	100,000,000	125,000,000	100,000,000	72,525,000	46,500,000	100,000,000	124,100,000	83,325,000	72,525,000	89,000,000	100.00	99.28	83.33	100.00	191.40	-14.6	0.2
	Kegiatan Peringatan Hari Besar Islami	200,000,000	199,334,000	108,852,650	156,180,000	156,558,400	198,200,000	199,182,500	108,102,500	156,180,000	156,400,000	99.10	99.92	99.31	100.00	99.90	-0.3	#DIV/0!
	Kegiatan POSPEDA (Pekan Olah Raga Pondok Pesantren)	50,000,000	55,000,000	35,000,000	33,300,000	38,841,600	47,750,000	55,000,000	32,275,000	33,300,000	24,000,000	95.50	100.00	92.21	100.00	61.79	10.0	#DIV/0!
	Kegiatan Penyusunan Sistem Pengendalian Hibah & Bansos	100,000,000	50,070,000	35,000,000	0	0	100,000,000	50,070,000	0	0	0	100.00	100.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Kegiatan Peningkatan Administrasi Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos	100,000,000	100,000,000		32,700,000	25,000,000	100,000,000	100,000,000	31,174,000	32,700,000	25,000,000	100.00	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00	0.0	#DIV/0!
	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Takmir Masjid Agung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,700,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Kegiatan Peringatan Hari Santri Nasioanal	0	0	0	0	0	0	0	0	245,820,500	250,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan																	
	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda	17,000,000	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	16,740,000	18,000,000	15,500,000	0	18,000,000	98.47	100.00	86.11	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
C	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																	
1	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kantor																	
	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor	30,446,000	28,240,200	9,027,700	10,300,000	22,300,000	30,075,000	28,232,500	21,302,300	10,300,000	21,775,000	98.78	99.97	235.97	100.00	97.65	13.8	7.3
	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor	30,446,000	28,240,200	9,027,700	10,300,000	22,300,000	30,075,000	28,232,500	21,302,300	10,300,000	21,775,000	98.78	99.97	235.97	100.00	97.65	-7.2	#DIV/0!
2	Program Peningkatan Disiplin aparat																	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	7,400,000	0	0	0	0	4,400,000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	59.46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja dan keuangan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,461,000	2,250,000	100.00	100.00	100.00	98.44	90.00	0.0	#DIV/0!
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,100,000	2,500,000	2,500,000	2,461,000	2,278,250	84.00	100.00	100.00	98.44	91.13	0.0	#DIV/0!
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Realisasi Keuangan Semesteran	32,181,000	35,352,000	32,998,000	26,641,000	46,209,400	27,651,000	35,352,000	32,639,900	25,876,000	45,979,000	85.92	100.00	98.91	97.13	99.50	14.3	19.3

4	Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja																		
	Kegiatan Penyusunan Penunjang Operasional SKPD	287,234,000	332,108,240	279,183,400	246,194,500	439,565,640	283,428,189	320,284,601	218,471,040	230,069,344	307,955,760	98.68	96.44	78.25	93.45	70.06	16.6	5.1	
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah	27,711,000	52,444,800	42,819,800	17,507,400	22,241,300	22,903,100	52,444,800	41,464,300	17,197,400	21,091,000	82.65	100.00	96.83	98.23	94.83	9.7	18.0	
	Kegiatan Penunjang Operasional ULP	0	0	0	161,367,500	0	0	0	0	135,536,300	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	83.99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPd	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,461,000	2,499,150	#DIV/0!	100.00	100.00	98.44	99.97	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Kegiatan Penyusunan Renstra	75,000,000	0	0	0	33,897,700	73,961,000	0	0	0	25,793,650	98.61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	76.09	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama	0	0	0	0	26,475,900	0	0	0	0	26,124,900	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98.67	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Kegiatan Pengendalian dan monitoring pelaksanaan fisik konstruksi	0	0	0	0	66,400,000	0	0	0	0	55,375,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	83.40	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
	Kegiatan Verifikasi rencana Kegiatan anggaran (RKA) OPD	144,144,000	141,369,000	85,808,800	159,293,800	0	138,806,500	140,475,000	93,367,900	116,966,550	0	96.30	99.37	108.81	73.43	#DIV/0!	-13.9	-26.8	
6	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN SISTEM INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH																		
	Kegiatan evaluasi Pelaksanaan pekerjaan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan kegiatan fisik konstruksi	82,042,000	77,992,000	31,354,000	0	0	82,042,000	72,052,000	18,438,975	0	0	100.00	92.38	58.81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Kegiatan Pengendalian dan monitoring pelaksanaan fisik konstruksi	128,869,000	104,569,000	79,084,000	76,087,500	128,869,000	104,569,000	57,039,525	74,387,500	55,375,000	100.00	100.00	72.13	97.77	#VALUE!	#VALUE!	-14.9		
7	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN																		
	Kegiatan Penyusunan Analisa standar Belanja	164,868,000	168,494,000	120,226,340	111,027,500	0	164,965,050	145,909,000	112,493,500	110,797,500	0	100.06	86.60	93.57	99.79	#DIV/0!	-33.5	-34.0	
8	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU																		
	Kegiatan fasilitasi dan Koordinasi Lintas SKPD	0	0	0	47,188,590	0	0	0	0	41,183,250	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	87.27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
D	BAGIAN UMUM																		#DIV/0!
1	Belanja Tidak Langsung																		#DIV/0!
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150,000,000	0	0	0	66,096,200	135,891,000	0	0	0	57,848,000	90.59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	87.52%	#DIV/0!	#DIV/0!	

	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	3,932,403,050	2,472,213,450	1,117,256,054	0	480,724,050	3,824,865,850	2,391,962,600	294,422,700		465,314,100	97.27%	96.75%	26.35%	#DIV/0!	96.79%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga KDH & WKDH	90,126,700	119,957,050	183,315,150	0	1,074,179,200	88,903,500	108,235,400	19,017,000	258,665,450	983,920,300	98.64%	90.23%	10.37%	#DIV/0!	91.60%	#DIV/0!	370.0
	Tersedianya alat Studio dan Komunikasi	198,000,000	0	0	0	0	196,504,000		0	0	0	99.24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,470,286,300	1,918,237,300	1,702,212,296	2,817,713,300	1,207,713,950	2,398,657,150	1,855,603,100	1,501,198,800	2,199,642,300	1,095,203,200	97.10%	96.73%	88.19%	78.06%	90.68%	-6.3	-11.4
	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Serbaguna	50,000,000	50,000,000	0	0	0	49,358,000	49,610,350	0	0	0	98.72%	99.22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Terbelinya PDH & Pakaian Olahraga	92,485,000	135,000,000	0	0	0	84,800,000	127,155,900	56,690,000	69,105,000	67,380,000	91.69%	94.19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3.5
	Pelatihan e-Purchasing Bagi PP & PPK	175,523,900	126,266,400	0	144,478,800	120,316,050	120,738,300	88,359,300	0	120,671,700	96,283,150	68.79%	69.98%	#DIV/0!	83.52%	80.03%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar Realisasi OPD	2,500,000	2,500,000	1,620,100	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,360,000	1,463,500	2,490,200	2,464,750	100.00%	94.40%	90.33%	99.61%	98.59%	4.8	6.4
	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun	2,500,000	2,500,000	2,060,000	2,500,000	2,500,000	2,261,100	2,290,000	1,910,000	2,290,000	2,002,350	90.44%	91.60%	92.72%	91.60%	80.09%	0.9	-2.0
	Terlaksananya Operasional OPD	2,043,584,850	2,334,384,850	2,277,384,850	2,674,924,004	2,527,338,700	1,893,180,700	2,094,145,968	1,829,726,030	2,302,594,441	1,942,344,715	92.64%	89.71%	80.34%	86.08%	76.85%	5.9	2.0
	Terlaksananya Operasional LPSE	322,812,500	103,234,500	164,078,200	537,130,000	728,172,600	83,364,150	79,393,200	114,430,000	522,732,561	586,301,750	25.82%	76.91%	69.74%	97.32%	80.52%	63.5	102.1
	Terlaksananya Operasional Unit Layanan Pengadaan	103,234,500	324,612,500	386,580,000	0	0	283,338,800	316,527,100	362,230,350	0	0	274.46%	97.51%	93.70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Tersusunnya Evaluasi Renja OPD	0	2,500,000	2,026,000	2,500,000	2,500,000	0	1,979,000	773,600	2,296,000	2,168,950	#DIV/0!	79.16%	38.18%	91.84%	86.76%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Terlaksananya Penunjang Operasional KDH & WKDH	0	0	0	1,559,800,000	1,327,966,100	0	0	0	512,305,000	685,708,748	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	32.84%	51.64%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pembebasan Lahan Dan Bangunan	71,824,456,377	49,625,111,827	1,580,487,800	0	0	25,784,308,700	8,637,477,299	50,000,000	0	0	35.90%	17.41%	3.16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Peningkatan Manajemen Asset Barang Daerah	253,000,000	8,667,000	5,963,500	5,963,500	0	233,000,000	0	4,814,500	5,785,200	0	92.09%	0.00%	80.73%	97.01%	#DIV/0!	-56.9	#DIV/0!
	Manajemen Pemanfaatan/Pengolahan Barang	305,050,000	0	0	0	0	265,675,500	0	0	0	0	87.09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	O/M Gedung Serba Guna Ratu Ejuh	0	593,641,800	0	0	0	0	460,869,870	0	0	0	#DIV/0!	77.63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
H	BAGIAN PEREKONOMIAN																	
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29,138,000			48,027,300	114,235,700	29,138,000			47,892,400	111,720,800	100.00			99.72	97.80	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				5,500,000	2,600,000				5,500,000	2,600,000				100.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	2,500,000	2,500,000	1,100,000	1,000,000	1,400,000	2,500,000	2,500,000	1,100,000	977,900	1,319,500	100.00	100.00	100.00	97.79	94.25	0.0	#DIV/0!

	Jumlah Laporan Tahun Akhir	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,078,200	0	0	0	0	421,800	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja																	
	Tersedianya Penunjang Operasional SKPD	0	0	0	0	388,365,700	0	0	0	0	298,257,068	0	0	0	0	90,108,632	#DIV/0!	#DIV/0!
	Jumlah Dokumen Lakip SKPD	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	1,967,900	0	0	0	0	532,100	#DIV/0!	#DIV/0!
	Jumlah Dokumen Renja SKPD	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,490,300	0	0	0	0	9,700	#DIV/0!	#DIV/0!
J	BAGIAN ORGANISASI																	
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah																	
	Penyusunan Dokumen Lakip Kabupaten	-	-	0	0	72,588,000	0	0	0	0	69,106,084	0	0	0	0	95	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten	-	-	0	0	27,000,000	0	0	0	0	25,042,800	0	0	0	0	93	#DIV/0!	#DIV/0!
																		#DIV/0!
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50,000,000	63,130,000	0	42,520,000	49,050,000	50,000,000	62,767,500	0	41,020,000	40,130,000	100	99	0	96	82	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	106,756,700	100,729,700	61,074,800	124,252,000	69,860,950	106,406,700	100,729,700	59,469,800	123,209,600	69,812,950	100	100	97	99	100	3.7	4.4
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106,756,700	100,729,700	61,074,800	124,252,000	69,860,950	106,406,700	100,729,700	59,469,800	123,209,600	69,812,950	100	100	97	99	100	3.7	4.4
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
	Gelar Budaya Kerja	0	200,000,000	165,328,900	0	60,000,000	0	189,077,000	140,487,600	0	14,760,000	-	95	85	0	25	#DIV/0!	#DIV/0!
	Kegiatan Pembinaan Tata Naskah dan Kearsipan	125,000,000	147,040,000	0	0	0	125,000,000	146,975,000	0	0	0	100	100	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pengembangan regulasi kebijakan di bidang analisa jabatan	0	65,000,000	43,500,000	59,000,000	31,238,600	0	64,825,000	43,500,000	59,000,000	31,238,600	-	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyusunan Dokumen roadmap reformasi birokrasi	40,000,000	0	0	0	0	39,703,000	0	0	0	0	99	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi (RMRB) Daerah	0	120,000,000	0	0	0	0	112,000,000	0	0	0	-	93	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
	Kegiatan Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,444,000	2,422,000	2,500,000	100	100	98	97	100	0.0	0.0

	Pembuatan Buku Juknis/ Juklak	125,000,000	0	0	0	0	122,600,000	0	0	0	0	98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																	
	Penyusunan rencana pembinaan Karir PNS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	100	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS		90,000,000	87,000,000	97,513,400	0	88,299,800	83,575,000	96,958,400			-	98	96	99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	#DIV/0!
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	3,650,000	0	0	0	3,500,000	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	TOTAL	109,489,342,270	86,613,174,455	37,250,689,678	35,822,735,512	35,013,258,015	61,776,514,133	42,936,140,364	28,690,904,849	28,381,680,623	29,065,019,690	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Bangkalan,

2019

**Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

Drs. SETIJABUDHI.NK,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196003011985021004

8	Persentase Tingkat Kelulusan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai minimal 420	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Persentase agenda protokoler terencana yang terfasilitasi	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Capaian Kinerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bangkalan,

2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

Drs. SETIJABUDHI.NK.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196003011985021004

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH								SASARAN								STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET						URAIAN	INDIKATOR	TARGET								
			2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024			2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024			
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Optimalisasi fasilitasi peningkatan kualitas administrasi Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Memfasilitasi perangkat daerah dalam pengumpulan dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B (62)	B(70)	BB(72)	BB(80)	A (81)	A (83)		Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Mengoptimalkan penataan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pengembangan kinerja perangkat daerah;	Menyelenggarakan akuntabilitas dan pengembangan kinerja, penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah, serta penataan kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan;	Program Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta pengembangan kinerja
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	82.29	82.3	82.5	82.6	82.7	82.8		Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik	80%	80%	90%	90%	100%	100%			
									Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Meningkatkan tugas koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan keagamaan dan kesejahteraan sosial;	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan keagamaan, budaya, kependidikan, kepemudaan dan kesejahteraan sosial;	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan
										Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum	Melaksanakan penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Pengkajian Hukum

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH							SASARAN						STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM		
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	TARGET								
			2019	2020	2021	2022	2023			Transisi 2024	2019	2020	2021				2022	2023
									Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindak lanjuti	60%	65%	70%	75%	80%	100%	Meningkatkan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah;	Melaksanakan pelayanan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah;	Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah
									Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan Partisipasi dan koordinasi perangkat daerah terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undang di Bidang Cukai	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
									Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui monitoring, evaluasi, transparansi perencanaan dan penggaran serta pelaksanaan APBD;	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian melalui monitoring, evaluasi, transparansi perencanaan dan penggaran serta pelaksanaan APBD;	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan
									Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelanggan PBJ	75	76	77	78	80	80	Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa;	Memfasilitasi pelayanan pengadaan barang dan jasa;	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
									Indeks Kepuasan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah	75	76	77	78	80	80	Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolkan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah;	Melaksanakan pelayanan Kehumasan dan keprotokolkan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah;	Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolkan dan kehumasan
									Persentase Perlengkapan , keuangan dan Rumah Tangga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;	Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH							SASARAN						STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM		
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	TARGET								
			2019	2020	2021	2022	2023			Transisi 2024	2019	2020	2021				2022	2023
								Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	78.50	79.00	79.50	80.00	80.50	80.50	Meningkatkan Sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja perangkat daerah	Memberikan pelayanan yg optimal internal perangkat daerah	Program Pelayanan di Kesekretariatan

Bangkalan, 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN


~~Dr. SETI ABUDHI Nk. M. I.~~
Pewaja Utama Muda
NIP. 1964003011985021004

TUJUAN	SASARAN SEKRETARIAT DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		7) Meningkatkan Partisipasi dan koordinasi perangkat daerah terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undang di Bidang Cukai	7) Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai
		8) Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa;	8) Memfasilitasi pelayanan pengadaan barang dan jasa;
		9) Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah;	9) Melaksanakan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	10) Meningkatkan Partisipasi dan koordinasi perangkat daerah terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undang di Bidang Cukai 11) Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum 12) Meningkatkan Sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja perangkat daerah;	10) Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai 11) Melaksanakan penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum. 12) Memberikan pelayanan yg optimal di internal perangkat daerah;

Bangkalan,

2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN


Drs. SETIABUDI, S.H., M.H.
Pemula Utama Muda
NIP. 1964003011985021004

Tabel VII.1-

Indikator Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah kabupaten Bangkalan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	
2	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B(60,10)	B (62)	B(70)	BB(72)	BB(80)	A (81)	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	80.27	82,29	82.3	82.5	82.6	82.7	
4	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	85%	85%	85%	90%	90%	90%	
5	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	58%	60%	70%	80%	90%	100%	
6	Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik	100%	80%	80%	90%	90%	100%	
7	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	85%	85%	85%	90%	90%	90%	
8	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	85%	85%	85%	90%	90%	90%	
9	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindak lanjuti	60%	60%	65%	70%	75%	80%	
10	Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	85%	85%	85%	90%	90%	90%	
12	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	75	75	76	77	78	80	
13	Indeks Kepuasan Pimpinan KDH dan WKDH	75	75	76	77	78	80	

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
14	Persentase Perlengkapan, keuangan dan Rumah Tangga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	78.50	78.50	79.00	79.50	80.00	80.50	

Bangkalan,

2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN


Drs. SETI ABUDHI NK.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1964003011985021004

TABEL VI.I
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Pansung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	5 01 01 28	Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	85%	85%	1,627,426,460	85%	1,714,397,783	90%	1,782,973,694	90%	1,872,122,379	90%	2,021,892,169	90%	9,018,812,485	Bag-Adpum	Bkl
			01 01 28 01	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Umum				1,067,426,460		842,897,783		876,613,694		920,444,379		680,207,857		4,387,590,173		
					Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Umum		5 Dokumen	526,426,460	5 Dokumen	622,222,783	5 Dokumen	647,111,694	5 Dokumen	679,467,279	6 Dokumen	551,888,625	26 dok	3,027,116,841		
					Jumlah Kecamatan/desa yang difasilitasi batas Daerah		5 Kecamatan/Desa	144,000,000	5 Kecamatan/Desa	220,675,000	5 Kecamatan/Desa	229,502,000	5 Kecamatan/Desa	240,977,100	5 Kecamatan/Desa	128,319,232	25 Kecamatan/Desa	963,473,332		
					Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Umum		100%	397,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	397,000,000		
			01 01 28 02	Fasilitasi Bina Kecamatan dan Kelurahan				225,000,000		377,450,000		392,548,000		412,175,400		322,893,576		1,730,066,976		
					Persentase Kecamatan yang difasilitasi dalam pembinaan Kecamatan dan Kelurahan		100%	200,000,000	100%	281,475,000	100%	292,734,000	100%	307,370,700	100%	200,024,320	100%	1,281,604,020		
					Persentase Dokumen Profil Kecamatan yang disusun		100%	25,000,000	100%	95,975,000	100%	99,814,000	100%	104,804,700	100%	122,869,256	100%	448,462,956		
			01 01 28 03	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah				335,000,000		494,050,000		513,812,000		539,502,600		1,018,790,736		2,901,155,336		
					Persentase Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang difasilitasi		100%	335,000,000	100%	494,050,000	100%	513,812,000	100%	539,502,600	100%	418,790,736	100%	2,301,155,336		
					Fasilitasi Pelaksanaan Pelantikan KDH dan WKDH		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	400,000,000	1 Kegiatan	400,000,000		
					Fasilitasi Pencanangan Saratus Hari Kerja KDH dan WKDH		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan		5 01 01 34	Program Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta pengembangan Kinerja	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	51%	60%	1,055,600,000	70%	1,247,635,200	80%	1,297,620,708	90%	1,362,667,840	100%	1,416,509,660	100%	6,380,033,408	bagian organisasi setda	Bkl
			01 01 34 01	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Analisis Jabatan				261,000,000		426,659,999		437,726,399		462,112,721		416,281,737		2,003,780,856		
					jumlah peraturan ttg anjab dan ABK yg disusun		-	-	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	160,000,000.00	1 Dokumen	90,000,000	4 Dokumen	550,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
					jumlah dokumen hasil monev kelembagaan perangkat daerah yang disusun		1 Dokumen	67,687,250	1 Dokumen	71,748,484	1 Dokumen	74,618,423	1 Dokumen	78,349,346	1 Dokumen	84,617,293	5 Dokumen	377,020,796		
					jumlah rancangan perkada tentang perangkat daerah		8 Peraturan	62,872,750	8 Peraturan	66,645,115	8 Peraturan	69,310,920	8 Peraturan	72,776,466	8 Peraturan	78,598,583	40 Peraturan	350,203,834		
					jumlah peserta sosialisasi		61 Peserta	84,000,000	61 Peserta	89,040,000	61 Peserta	92,601,600	61 Peserta	97,231,680	61 Peserta	105,010,214	305 Peserta	467,883,494		
					jumlah kebijakan pedoman kerja yang disusun		1 Peraturan	46,440,000	1 Peraturan	49,226,400	1 Peraturan	51,195,456	1 Peraturan	53,755,229	1 Peraturan	58,055,647	5 Peraturan	258,672,732		
			01 01 34 02	Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah				365,600,000		366,235,201		386,964,709		403,979,040		463,925,756		1,986,704,706		
					jumlah dokumen tata naskah dinas yang disusun		1 Dokumen	121,487,000	1 Dokumen	53,776,220	1 Dokumen	58,927,269	1 Dokumen	60,623,632	1 Dokumen	61,873,523	5 Dokumen	356,687,644		
					jumlah dokumen penyempurnaan dan pelaporan pelaksanaan SOP daerah yang disusun		1 Dokumen	77,497,500	1 Dokumen	82,147,350	1 Dokumen	85,433,244	1 Dokumen	89,704,906	1 Dokumen	96,881,299	5 Dokumen	431,664,299		
					jumlah dokumen monev atas hasil survey kepuasan masyarakat		1 Dokumen	61,382,500	1 Dokumen	65,065,450	1 Dokumen	67,668,068	1 Dokumen	71,051,471	1 Dokumen	76,735,589	5 Dokumen	341,903,078		
					jumlah UPP yang mengikuti kompetisi		1 Unit Pelayanan	58,613,000	1 Unit Pelayanan	62,129,780	1 Unit Pelayanan	64,614,971	1 Unit Pelayanan	67,845,720	1 Unit Pelayanan	73,273,377	5 Unit Pelayanan	326,476,848		
					jumlah laporan SPM yang disusun		1 Dokumen	46,620,000	1 Dokumen	49,417,200	1 Dokumen	51,393,888	1 Dokumen	53,963,582	1 Dokumen	58,280,669	5 Dokumen	259,675,339		
					jumlah peserta sosialisasi		-	-	90 Peserta	53,699,201	90 Peserta	58,927,269	90 Peserta	60,789,729	90 Peserta	96,881,299	360 Peserta	270,297,498		
			01 01 34 03	Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja				429,000,000		454,740,000		472,929,600		496,576,079		536,302,167		2,389,547,846		
					jumlah dokumen LKJIP Kabupaten yang disusun		1 Dokumen	275,859,600	1 Dokumen	292,411,176	1 Dokumen	304,107,623	1 Dokumen	319,313,004	1 Dokumen	344,858,045	5 Dokumen	1,536,549,448		
					jumlah dokumen perjanjian kinerja yang disusun		1 Dokumen	7,566,000	1 Dokumen	8,019,960	1 Dokumen	8,340,758	1 Dokumen	8,757,796	1 Dokumen	9,458,420	5 Dokumen	42,142,934		
					Jumlah Peserta Sosialisasi		83 orang	44,974,400	83 orang	47,672,864	83 orang	49,579,779	83 orang	52,058,767	83 orang	56,223,469	415 orang	250,509,279		
					jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	100,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100,600,000		
					Jumlah Peserta yang dilakukan Monev Road Map Reformasi Birokrasi		-	-	61 peserta	106,636,000	61 peserta	110,901,440	61 peserta	116,446,512	61 peserta	125,762,233	244 Peserta	459,746,185		
		Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	5 01 32	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	85%	85%	200,000,000	85%	554,500,000	90%	573,924,000	90%	606,988,200	90%	655,547,256	90%	2,590,959,456	Bag-Adbang	Bkl
			5 01 32 01	Pengendalian Pembangunan Daerah				200,000,000		210,000,000		218,400,000		233,688,000		252,383,040		1,114,471,040		
					jumlah laporan monitoring kegiatan fisik konstruksi		1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	105,000,000	1 Dokumen	109,200,000	1 Dokumen	116,844,000	1 Dokumen	126,191,520	5 Dokumen	557,235,520		
					Persentase Fasilitas Pelaksanaan Rakor PD Lingkup Asisten II		100%	100,000,000	100%	105,000,000	100%	109,200,000	100%	116,844,000	100%	126,191,520	100%	557,235,520		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi				
										2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
							Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Daerah				-	344,500,000		355,524,000		373,300,200		403,164,216							
			5	01	32	02		Dokumen Informasi Manajemen Pelaporan (Bulanan/Triwulan/Semesteran)			-	18 Laporan	300,000,000	18 Laporan	315,000,000	18 Laporan	330,000,000	18 Laporan	350,000,000	72 Laporan		1,295,000,000			
								Laporan Pengawasan Evaluasi Realisasi Anggaran			-	12 Laporan	44,500,000	12 Laporan	40,524,000	12 Laporan	43,300,200	12 Laporan	53,164,216	48 Laporan		181,488,416			
	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	5	01	01	29	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	85%	85%	2,025,000,000	85%	1,976,900,000	90%	2,055,976,000	90%	2,157,139,200	90%	2,329,690,895	90%		10,544,706,095	Bag-Kesra	Bkl	
				01	01	29	01	Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan Sosial				200,000,000		212,000,000		220,480,000		231,504,000		250,024,320		1,114,008,320			
								Jumlah Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Monev			24 Kali	40,000,000	24 Kali	42,400,000	24 Kali	44,096,000	24 Kali	46,300,800	24 Kali	50,004,864	120 kali	222,801,664			
								Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan			75 Orang	40,000,000	75 Orang	42,400,000	75 Orang	44,096,000	75 Orang	46,300,800	75 Orang	50,004,864	375 orang	222,801,664			
								Jumlah kehadiran peserta Hotmil Quran			200 Orang	40,000,000	200 Orang	42,400,000	200 Orang	44,096,000	200 Orang	46,300,800	200 Orang	50,004,864	1000 orang	222,801,664			
								Jumlah Kehadiran Peserta Pengajian Rutin			150 Orang	40,000,000	150 Orang	42,400,000	150 Orang	44,096,000	150 Orang	46,300,800	150 Orang	50,004,864	750 Orang	222,801,664			
								Jumlah Peserta acara Nisfu Sa'ban			200 Orang	40,000,000	200 Orang	42,400,000	200 Orang	44,096,000	200 Orang	46,300,800	200 Orang	50,004,864	1000 orang	222,801,664			
				01	01	29	02	Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Agama dan Kebudayaan				1,675,000,000		1,605,900,000		1,670,136,000		1,753,642,800		1,893,934,223		8,598,613,023			
								Jumlah Peserta MTQ yang diseleksi dan dibina			50 Orang	360,650,000	50 Orang	382,289,000	50 Orang	397,580,560	50 Orang	417,459,588	50 Orang	450,856,355	250 orang	2,008,835,503			
								Jumlah Peserta Sosialisasi Hibah Bansos			75 orang	37,580,000	75 orang	39,834,800	75 orang	41,428,192	75 orang	43,499,602	75 orang	46,979,570	375 orang	209,322,164			
								Persentase terlaksananya Kegiatan di Bulan Ramadhan			100%	119,200,000	100%	126,352,000	100%	131,406,080	100%	137,976,384	100%	149,014,495	100%	663,948,959			
								jumlah kegiatan peringatan hari besar islam			6 Kegiatan	307,390,000	6 Kegiatan	324,915,440	6 Kegiatan	337,912,058	6 Kegiatan	354,807,660	6 Kegiatan	383,192,273	30 keg	1,708,217,431			
								Jumlah Peserta yang di seleksi (POSPENDA)			50 Orang	29,680,000	50 Orang	31,460,800	50 Orang	32,719,232	50 Orang	34,355,194	50 Orang	37,103,609	250 orang	165,318,835			
								jumlah kegiatan pelayanan kebersihan masjid agung			1 Kegiatan	161,400,000	1 Kegiatan	171,084,000	1 Kegiatan	177,927,360	1 Kegiatan	186,823,728	1 Kegiatan	201,769,626	5 kegiatan	899,004,714			
								jumlah kegiatan rangkaian hari santri nasional yang dilaksanakan			1 Kegiatan	239,050,000	1 Kegiatan	253,393,000	1 Kegiatan	263,528,720	1 Kegiatan	276,705,156	1 Kegiatan	298,841,568	5 kegiatan	1,331,518,444			
								Jumlah Peserta Pemantauan Rukyetul Hilal			100 Orang	20,050,000	100 Orang	21,253,000	100 Orang	22,103,120	100 Orang	23,208,276	100 Orang	25,064,938	500 orang	111,679,334			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
							Persentase terlaksananya Kegiatan zikir dan sholawat		100%	400,000,000	100%	255,317,960	100%	265,530,678	100%	278,807,212	100%	301,111,789	100%	1,500,767,639			
			01	01	29	03	Koordinasi, Fasilitas dan Monev Bidang Pendidikan dan Kepemudaan			150,000,000		159,000,000		165,360,000		171,992,400		185,732,352		832,084,752			
							Jumlah Rapat Koordinasi Fasilitas dan Monev		24 Kali	50,000,000	24 Kali	53,000,000	24 Kali	55,120,000	24 Kali	57,342,800	24 Kali	61,910,784	120 kali	277,373,584			
							Jumlah Peserta Sosialisasi		75 Orang	50,000,000	75 Orang	53,000,000	75 Orang	55,120,000	75 Orang	57,324,800	75 Orang	61,910,784	375 orang	277,355,584			
							Jumlah Peserta yang Dibina		50 Orang	50,000,000	50 Orang	53,000,000	50 Orang	55,120,000	50 Orang	57,324,800	50 Orang	61,910,784	250 orang	277,355,584			
		Persentase Perengkapan, keuangan dan Rumah Tangga yang terfasilitasi	5	01	01	36	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Rumah Tangga yang terfasilitasi	100%	100%	4,568,256,350	100%	4,179,209,000	100%	4,346,377,361	100%	4,607,160,002	100%	4,952,913,628	100%	22,653,916,341	Bag. Keuangan dan Perengkapan	Bkl	
			01	01	36	01	Fasilitas dan Koordinasi Administrasi Keuangan dan Perengkapan			1,989,863,050		2,109,254,833		2,193,625,027		2,325,242,528		2,511,261,931		11,129,247,369			
							Persentase kebutuhan koordinasi lintas sektor bidang administrasi umum		100%	101,000,000	100%	107,060,000	100%	111,342,400	100%	118,022,944	100%	127,464,780	100%	564,890,124			
							Persentase pelaksanaan operasional LPSE		100%	1,600,537,400	100%	1,696,569,644	100%	1,764,432,430	100%	1,870,298,376	100%	2,019,922,246	100%	8,951,760,096			
							Jumlah peserta pelatihan		60 Orang	288,325,650	60 Orang	305,625,189	60 Orang	317,850,197	60 Orang	336,921,208	60 Orang	363,874,905	300 Orang	1,612,597,149			
			01	01	36	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan			2,578,393,300		2,069,954,167		2,152,752,334		2,281,917,474		2,441,651,697		11,524,668,972			
							Jumlah Jenis kebutuhan rumah tangga Pimpinan Daerah yang disediakan		10 Jenis	2,578,393,300	10 Jenis	2,069,954,167	10 Jenis	2,152,752,334	10 Jenis	2,281,917,474	10 Jenis	2,441,651,697	50 Jenis	11,524,668,972			
		Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	5	01	01	13	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	100%	100%	60,000,000	100%	62,700,000	100%	64,765,415	100%	83,361,333	100%	93,231,255	100%	364,058,003	Bagian Perekonomian	Bkl	
			01	01	13	02	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai			60,000,000		62,700,000		64,765,415		83,361,333		93,231,255		364,058,003			
							Jumlah Perangkat Daerah yang dipantau sesuai ketentuan bidang cukai		7 PD	60,000,000	7 PD	62,700,000	7 PD	64,765,415	7 PD	83,361,333	7 PD	93,231,255	35 PD	364,058,003			
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindak lanjuti	5	01	01	31	Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah	60%	60%	1,000,000,000	65%	1,050,000,000	70%	1,092,000,000	75%	1,146,600,000	80%	1,238,328,000	100%	5,526,928,000	Bag.Per ekonomian	Bkl	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
			01 01 31 01	Koordinasi Penyusunan Rumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan				200,000,000		210,000,000		218,400,000		229,320,000		247,665,600		1,105,385,600		
					Jumlah fasilitasi bidang pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan		13Kali	200,000,000	13Kali	210,000,000	13Kali	218,400,000	13Kali	229,320,000	13Kali	247,665,600	65 kali	1,105,385,600		
			01 01 31 02	Koordinasi Penyusunan Rumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Produk Daerah			500,000,000		525,000,000		546,000,000		573,300,000		619,164,000		2,763,464,000			
					Jumlah fasilitasi bidang pembinaan dan pengembangan produk daerah yang dilakukan		7 Kali	500,000,000	7 Kali	525,000,000	7 Kali	546,000,000	7 Kali	573,300,000	7 Kali	619,164,000	35 Kali	2,763,464,000		
			01 01 31 03	Koordinasi Penyusunan Rumusan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan BUMD			300,000,000		315,000,000	11 Kali	327,600,000	11 Kali	343,980,000	11 Kali	371,498,400	55 Kali	1,658,078,400			
					Jumlah fasilitasi penanaman modal dan BUMD yang dilakukan		11 Kali	300,000,000	11 Kali	315,000,000	11 Kali	327,600,000	11 Kali	343,980,000	11 Kali	371,498,400	55 Kali	1,658,078,400		
		Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	5 01 01 33	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	75	75	1,395,203,211	76	1,478,915,403	77	1,552,861,174	78	1,630,504,233	80	1,793,554,656	80	7,851,038,677	Bag-LPBJ	Bkl
			01 01 33 01	Penatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa			491,931,903		286,127,817		300,434,208		315,455,918		347,001,510		1,740,951,356			
					Jumlah dokumen pengadaan barang dan jasa yang tersusun		0	0	1 Dokumen	84,800,000	1 Dokumen	89,040,000	1 Dokumen	93,492,000	1 Dokumen	102,841,200	4 Dokumen	370,173,200		
					Jumlah aparatur pendidikan dan pelatihan formal		65 Orang	491,931,903	65 Orang	127,127,817	65 Orang	133,484,208	65 Orang	140,158,418	65 Orang	154,174,260	325 orang	1,046,876,606		
					Jumlah dokumen Pendampingan hukum yg terfasilitasi		0	0	1 Dokumen	74,200,000	1 Dokumen	77,910,000	1 Dokumen	81,805,500	1 Dokumen	89,986,050	4 Dokumen	323,901,550		
			01 01 33 02	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa			269,931,904		521,447,818		547,520,209		574,896,220		632,385,842		2,546,181,993			
					Jumlah Peserta yang mendapat pembinaan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa di kab.bangkalan		65 Peserta	269,931,904	65 Peserta	185,500,000	65 Peserta	194,775,000	65 Peserta	204,513,750	65 Peserta	224,965,125	325 Peserta	1,079,685,779		
					Jumlah Aplikasi proses pelelangan		0	0	1 Paket	335,947,818	1 Paket	352,745,209	1 Paket	370,382,470	1 Paket	407,420,717	4 Paket	1,466,496,214		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
			01 01 33 03	Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui Bagian PBJ				633,339,404		671,339,768		704,906,757		740,152,095		814,167,304		3,563,905,328		
				persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi			100%	633,339,404	100%	671,339,768	100%	704,906,757	100%	740,152,095	100%	814,167,304	100%	3,563,905,328		
		Indeks Kepuasan KDH ,WKDH Dan Sekretaris Daerah	5 01 01 35	Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolanan dan kehumasan	Indeks Kepuasan KDH ,WKDH Dan Sekretaris Daerah	75	75	971,900,000	76	998,414,000	77	1,048,334,700	78	1,100,751,435	80	1,177,804,036	80	5,297,204,171	Bag. Humas Protokol	Bkl
			01 01 35 01	Koordinasi Kehumasan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah				125,000,000		132,500,000		139,125,000		146,081,250		156,306,938		699,013,188		
				persentase informasi kegiatan Pimpinan yang difasilitasi			100%	125,000,000	100%	132,500,000	100%	139,125,000	100%	146,081,250	100%	156,306,938	100%	699,013,188		
			01 01 35 02	Penyebarluasan informasi KDH/WKDH, Sekretaris Daerah				360,000,000		371,000,000		389,550,000		409,027,500		437,659,425		1,967,236,925		
				persentase kegiatan pimpinan yang dipublikasikan			100%	360,000,000	100%	371,000,000	100%	389,550,000	100%	409,027,500	100%	437,659,425	100%	1,967,236,925		
			01 01 35 03	Koordinasi Keprotokolanan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah				486,900,000		494,914,000		519,659,700		545,642,685		583,837,673		2,630,954,058		
				persentase kegiatan pimpinan yang difasilitasi protokoler			100%	486,900,000	100%	494,914,000	100%	519,659,700	100%	545,642,685	100%	583,837,673	100%	2,630,954,058		
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	5 01 01 30	Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan pengkajian hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	85%	85%	1,200,326,000	85%	1,272,345,560	90%	1,323,239,382	90%	1,402,633,745	90%	1,514,844,445	90%	6,713,389,132	Bagian Hukum	Bkl
			01 01 30 01	Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan				400,000,000		424,000,000		440,960,000		467,417,600		504,811,008		2,237,188,608		
				Jumlah Peraturan Daerah yang disusun			7 Peraturan Daerah	200,000,000	7 Peraturan Daerah	212,000,000	7 Peraturan Daerah	220,480,000	7 Peraturan Daerah	233,708,800	7 Peraturan Daerah	252,405,504	35 Peraturan Daerah	1,118,594,304		
				Jumlah Peraturan Bupati yang disusun			100 Peraturan Bupati	100,000,000	100 Peraturan Bupati	106,000,000	100 Peraturan Bupati	110,240,000	100 Peraturan Bupati	116,854,400	100 Peraturan Bupati	126,202,752	500 Peraturan Bupati	559,297,152		
				Jumlah Keputusan Bupati yang disusun			200 Keputusan Bupati	100,000,000	200 Keputusan Bupati	106,000,000	200 Keputusan Bupati	110,240,000	200 Keputusan Bupati	116,854,400	200 Keputusan Bupati	126,202,752	1000 Keputusan Bupati	559,297,152		
			01 01 30 02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum				500,000,000		530,000,000		551,200,000		584,272,000		631,013,760		2,796,485,760		
				Jumlah Kasus dilingkungan Pemerintah daerah dan Masyarakat Miskin yang difasilitasi penanganannya			20 Kasus	300,000,000	20 Kasus	318,000,000	20 Kasus	330,720,000	20 Kasus	350,563,200	20 Kasus	378,608,256	100 Kasus	1,677,891,456		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
							Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang diberikan Penyuluhan Hukum		630 Orang	150,000,000	630 Orang	159,000,000	630 Orang	165,360,000	630 Orang	175,281,600	630 Orang	189,304,128	3150 orang	838,945,728			
							Jumlah Laporan Hak Asasi Manusia yang disusun		1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	53,000,000	1 Dokumen	55,120,000	1 Dokumen	58,427,200	1 Dokumen	63,101,376	5 Dokumen	279,648,576			
			01	01	30	03	Kegiatan Dokumentasi dan Pengkajian Hukum			300,326,000		318,345,560		331,079,382		350,944,145		379,019,677		1,679,714,764			
							Jumlah Jenis Peraturan Perundang-undangan yang didokumentasikan		5 Jenis	150,000,000	5 Jenis	159,000,000	5 Jenis	165,360,000	5 Jenis	175,281,600	5 Jenis	189,304,128	25 Jenis	838,945,728			
							Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan		36 Kali	90,326,000	36 Kali	95,745,560	36 Kali	99,575,382	36 Kali	105,549,905	36 Kali	113,993,898	180 Kali	505,190,745			
							Jumlah Kajian Akademis yang disusun		1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	63,600,000	1 Dokumen	66,144,000	1 Dokumen	70,112,640	1 Dokumen	75,721,651	5 Dokumen	335,578,291			
Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatian	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatian		5	01	01	16	Program Pelayanan Kesekretariatian	78.50%	78.50%	37,962,687,979	79.00%	23,282,189,004	79.50%	22,795,043,808	80.00%	23,293,485,290	80.50%	23,098,904,420	80.50%	130,432,310,501	Bag. umum	Bkl	
			01	01	16	01	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran			25,550,340,600		12,648,145,833		11,661,217,166		11,529,746,371		10,411,712,423		71,802,162,393			
							Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia		11 Jenis	2,616,931,900	11 Jenis	2,777,177,991	11 Jenis	2,916,036,891	11 Jenis	3,090,999,104	11 Jenis	3,307,369,041	55 jenis	14,708,514,927			
							Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang tersedia		24 Jenis	22,933,408,700	24 Jenis	9,871,967,842	24 Jenis	8,745,180,275	24 Jenis	8,438,747,267	24 Jenis	7,104,343,382	120 jenis	57,093,647,466			
			01	01	16	02	Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah			1,531,453,729		1,570,008,670		1,632,809,017		1,744,816,593		1,867,340,210		8,346,428,219			
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan		25 Kali	64,456,600	28 Kali	70,111,713	31 Kali	72,916,182	34 Kali	77,291,152	37 Kali	83,087,989	155 kali	367,863,636			
							Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan		160 Kali	1,466,997,129	160 Kali	1,499,896,957	170 Kali	1,559,892,835	175 Kali	1,667,525,441	180 Kali	1,784,252,221	845 kali	7,978,564,583			
			01	01	16	03	Pengelolaan dan Penataaksanaan Barang Milik Daerah			50,000,000		53,000,000		55,650,000		58,432,500		62,522,775		279,605,275			
							Jumlah laporan barang milik Daerah yg tersusun		1 Dokumen	50,000,000	14 Dokumen	53,000,000	14 Dokumen	55,650,000	14 Dokumen	58,432,500	14 Dokumen	62,522,775	57 Dokumen	279,605,275			
			01	01	16	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,404,678,850		1,567,786,905		1,646,176,250		1,744,946,825		1,884,542,571		9,248,131,401			
							Jumlah Jenis sarana aparatur yg dipelihara		7 Jenis	1,671,928,850	10 Jenis	782,280,000	10 Jenis	821,394,000	15 Jenis	870,677,640	25 Jenis	940,331,851	67 jenis	5,086,612,341			
							Jumlah prasarana aparatur yg dipelihara		5 Unit	732,750,000	5 Unit	785,506,905	5 Unit	824,782,250	5 Unit	874,269,185	5 Unit	944,210,720	25 Unit	4,161,519,060			
			01	01	16	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			6,029,714,800		5,359,313,096		5,627,278,750		5,936,779,081		6,411,721,407		29,364,807,134			
							Jumlah Jenis sarana aparatur yg diadakan		17 Jenis	4,104,857,450	20 Jenis	2,679,656,548	25 Jenis	2,813,639,375	25 Jenis	2,982,457,737	25 Jenis	3,221,054,356	112 Jenis	15,801,665,466			
							Jumlah prasarana aparatur yg diadakan		5 Unit	1,924,857,350	7 Unit	2,679,656,548	9 Unit	2,813,639,375	11 Unit	2,954,321,344	13 Unit	3,190,667,051	45 Unit	13,563,141,668			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
			01 01 16 06	Peningkatan Disiplin Pegawai				518,500,000		548,054,500		575,457,225		604,230,086		652,568,493		2,898,810,304		
					Jumlah pakian Aparatur dan kelengkapan yang diadakan		825 Buah	518.500.000	825 Buah	548.054.500	825 Buah	575.457.225	825 Buah	604.230.086	825 Buah	652.568.493	4125 Buah	2.898.810.304		
			01 01 16 07	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur			458,000,000		374,180,000		392,889,000		412,533,450		445,536,126		2,083,138,576			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
					Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar		50 Orang	458,000,000	50 Orang	374,180,000	50 Orang	392,889,000	50 Orang	412,533,450	50 Orang	445,536,126	250 Orang	2,083,138,576		
			01 01 16 08	Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah				395,000,000		318,700,000		331,886,400		357,799,584		394,423,551		1,797,809,535	Bag. Adbang	Bkl
					Jumlah Dokumen Penganggaran PD yang tersusun		1 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	106,000,000	4 Dokumen	109,180,000	4 Dokumen	115,730,800	4 Dokumen	124,989,264	17 Dokumen	555,900,064		
					Jumlah dokumen Perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	5 Dokumen	295,000,000	3 Dokumen	112,700,000	3 Dokumen	122,706,400	2 Dokumen	142,068,784	3 Dokumen	169,434,287	16 Dokumen	841,909,471		
					Jumlah data dan informasi PD		-	-	3 Data	100,000,000	3 Data	100,000,000	3 Data	100,000,000	3 Data	100,000,000	12 Data	400,000,000		
			01 01 16 09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah				325,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		725,000,000	Bag. Adbang	Bkl
					Jumlah laporan keuangan Triwulan yang dimonev, TEPPRA dan sistem informasi Laporan Keuangan sekabupaten Bangkalan Yang tersusun		3 Dokumen	325,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	325,000,000		
					Jumlah laporan Triwulan dan semesteran monv PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)		-	-	8 Laporan	50,000,000	8 Laporan	50,000,000	8 Laporan	50,000,000	8 Laporan	50,000,000	32 Laporan	200,000,000		
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun		-	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	200,000,000		
			01 01 16 10	Penyusunan Laporan Keuangan				50,000,000		53,000,000		55,120,000		58,427,200		63,101,376		279,648,576	Bag. Keuangan dan Padepok	Bkl
					jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosis/akhir tahun	1 dokumen	4 Dokumen	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	50,000,000		
					Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semester		-	-	84 Laporan	20,000,000	84 Laporan	20,000,000	84 Laporan	20,000,000	84 Laporan	20,000,000	336 Laporan	80,000,000		
					Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun		-	-	2 Dokumen	33,000,000	2 Dokumen	35,120,000	2 Dokumen	38,427,200	2 Dokumen	43,101,376	8 Dokumen	149,648,576		
			01 01 16 11	Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional				650,000,000		689,000,000		716,560,000		745,773,600		805,435,488		3,606,769,088	Bag. Adpum	Bkl
					jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi		4 Kegiatan	650,000,000	4 Kegiatan	689,000,000	4 Kegiatan	716,560,000	4 Kegiatan	745,773,600	4 Kegiatan	805,435,488	20 Kegiatan	2,956,769,088		
J U M L A H								52,066,400,000		37,817,205,950		37,933,116,242		39,263,413,657		40,293,220,419		207,373,356,268		

Bangkalan, 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

Dra. SETI ARDIYANTI, S.H.
BANKALAN, 11 Desember 2019

